

KEKUATAN PARTAI POLITIK ISLAM DALAM PEMILU LEGISLATIF 2024 PROVINSI JAWA BARAT (Studi Kasus Partai Persatuan Pembangunan)

Atik Rochaeni¹, Noer Apptika Fujilestari², Risyah Aprimayanti³

*Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani,
Cimahi, Indonesia¹²³*

E-mail: noerapptika@lecture.unjani.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengkaji kekuatan Partai Islam yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam Pemilihan Legislatif 2024 di Jawa Barat, provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia (48,7 juta jiwa) dan barometer politik nasional. Fokus penelitian ini adalah menguji daya tahan partai Islam tersebut dalam menghadapi tantangan fragmentasi suara Muslim akibat kemunculan partai baru (seperti Partai Ummat), pergeseran preferensi pemilih muda (56,7% berusia di bawah 40 tahun), serta dominasi isu ekonomi-inflasi yang menjadi prioritas 62% pemilih. Dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus, penelitian ini menggunakan kerangka teoritis political capital untuk memetakan strategi PPP (berbasis tradisionalisme dan jaringan pesantren). Data diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan sejumlah kader, pengurus, dan simpatisan PPP yang terlibat aktif dalam proses politik di tingkat lokal. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa modal kelembagaan dan modal sosial menjadi kunci utama bagi PPP untuk mempertahankan eksistensinya sebagai partai Islam ditengah kemunculan partai Islam lainnya, jaringan pesantren menjadi modal utama sebagai basis masa yang solid dan kuat dalam mendukung kemenangan PPP pada Pemilihan Legislatif 2024 di Jawa Barat.

Kata Kunci: *Pemilu Legislatif, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Islam, Political Capital*

ABSTRACT

This study aims to examine the strength of the United Development Party (Partai Persatuan Pembangunan/PPP) in the 2024 Legislative Election in West Java, the most populous province in Indonesia (48.7 million people) and a national political barometer. The research focuses on PPP's resilience as an Islamic party in facing challenges such as the fragmentation of Muslim votes due to the emergence of new parties like the Ummat Party, shifts in young voters' preferences (56.7% under the age of 40), and the dominance of economic-inflation issues, which are the top priority for 62% of voters. Employing a qualitative approach with a case study method, the study uses the theoretical framework of political capital to map PPP's

strategies, rooted in traditionalism and the pesantren (Islamic boarding school) network. The data was obtained from the results of in-depth interviews with a number of PPP cadres, administrators, and sympathizers who were actively involved in the political process at the local level. The findings indicate that institutional capital and social capital are the key factors enabling PPP to maintain its existence amidst competition from other Islamic parties. The pesantren network serves as a solid and consistent voter base supporting PPP's victory in the 2024 Legislative Election in West Java.

Keywords: *Legislative Election, PPP, Islamic Party, Political Capital.*

PENDAHULUAN

Keberadaan partai politik di negara demokratis seperti Indonesia, berperan sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Sebagai sarana yang mampu mengakomodir aspirasi rakyat dan berpotensi sebagai alat kontrol bagi kebijakan pemerintah, melalui fungsi tersebut terlihat jelas bahwa keberadaan partai politik diharapkan mampu menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Sebagai salah satu institusi yang berperan penting di negara demokrasi ini, diharapkan partai politik dapat menjadi pilar utama dalam memperkuat jalannya kehidupan demokrasi. Berdasarkan hal tersebut, berarti partai politik harus ada apabila ingin demokrasi dalam sebuah negara berjalan dengan baik.

Perkembangan partai politik di Indonesia diwarnai dengan kehadiran partai politik nasionalis dan partai politik agamis. Menelusuri perkembangan partai politik di negara demokrasi ini, merupakan hal menarik yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu tentang partai politik islam. Secara historis partai politik islam turut

mewarnai dinamika politik di Indonesia. Agama telah ditetapkan sebagai salah satu *variable* penting yang turut menentukan warga negara dalam sebuah panggung politik (Jung, 2014). Sebagai sub-sistem dalam politik, agama harus memiliki syarat untuk keberlangsungannya dalam politik dari waktu ke waktu. Sebagai satu-satunya agama yang memiliki kepastian untuk berasimilasi dengan tahapan perubahan eksistensi manusia, Agama Islam memiliki daya tarik yang kuat di setiap abad.

Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 menjadi momen krusial dalam dinamika demokrasi Indonesia, terutama dalam menguji daya tahan partai politik berbasis ideologi di tengah perubahan preferensi pemilih dan persaingan antarpartai yang semakin kompleks. Sebagai provinsi dengan populasi terbesar (48,7 juta jiwa, BPS 2023) dan kontributor suara signifikan dalam pemilu nasional, Jawa Barat menjadi medan pertarungan politik yang strategis. Provinsi ini tidak hanya mencerminkan keragaman sosio-kultural, seperti keberagaman etnis

(Sunda, Jawa, Betawi), agama, dan ekonomi, tetapi juga menjadi barometer tren politik nasional, termasuk peran partai Islam dalam merespons dinamika masyarakat modern.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menempati posisi unik dalam peta politik Jawa Barat. PPP, yang mengusung platform Islam tradisional dan memiliki akar sejarah di kalangan pesantren serta masyarakat pedesaan, hanya meraih 5,2% suara pada pemilu tahun 2019, menunjukkan penurunan akibat persaingan dengan partai Islam baru.

PPP berusaha mempertahankan pengaruhnya di pedesaan melalui figur ulama lokal dan loyalitas pemilih tradisional. Namun, PPP menghadapi tantangan multidimensi menjelang Pemilu 2024. Pertama, fragmentasi suara pemilih Muslim akibat kemunculan Partai Ummat berpotensi menggerus basis PPP yang sudah lemah dan meningkatkan persaingan dalam merebut pemilih muda. Kedua, pergeseran perilaku 56,7% pemilih Jawa Barat yang berusia di bawah 40 tahun—dengan 73% di antaranya mengakses informasi politik melalui TikTok dan Instagram—menuntut transformasi strategi kampanye. Namun, PPP masih bergantung pada metode konvensional seperti pengajian.

Perubahan preferensi pemilih, terutama di kalangan generasi muda,

juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan media sosial, cara pemilih mendapatkan informasi dan berinteraksi dengan partai politik telah berubah. PPP perlu beradaptasi dengan perubahan ini untuk tetap relevan dan menarik bagi pemilih. Selain itu, dinamika sosial dan budaya di Jawa Barat, yang meliputi keberagaman etnis, agama, dan latar belakang sosial ekonomi, juga mempengaruhi perilaku pemilih.

Dinamika lokal seperti polarisasi keagamaan pasca-Pilkada 2020 dan dominasi isu ekonomi-inflasi (yang menjadi prioritas 62% pemilih menurut Litbang Kompas, 2023) juga memengaruhi daya tarik partai. PPP dinilai kurang responsif dalam merespons isu tersebut. Meski demikian, jaringan pesantren dan ulama tetap menjadi modal penting PPP untuk mempertahankan basis loyalisnya. Partai ini perlu memperkuat adaptasi terhadap perubahan demografi, teknologi, dan fragmentasi politik agar tetap relevan di tengah persaingan ketat Pemilu 2024. Oleh karena itu, analisis mendalam tentang kekuatan PPP sangat diperlukan untuk memahami bagaimana partai ini dapat memanfaatkan potensi yang ada dan mengatasi tantangan yang dihadapi.

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini mengkaji pola kekuatan PPP dalam merespons tantangan tersebut melalui pendekatan tiga kerangka teoritis: (1) *resource mobilization theory* untuk analisis kapasitas organisasi dan jaringan keagamaan, (2) *issue ownership theory* dalam membingkai isu prioritas pemilu, dan (3) *digital campaign efficiency* untuk mengevaluasi adaptasi teknologi. Fokus pada Jawa Barat dipilih karena provinsi ini menjadi laboratorium politik Islam yang unik: PPP harus mempertahankan basis NU di tengah gempuran partai Islam lainnya seperti PKS, PKB dan partai Ummat sebagai partai baru.

Pierre Bourdieu (1986), dalam bukunya *The Form of Capital* dalam berhubungan dengan dunia sosial, individu tidak terlepas dari interaksi dan ruang sosial. Dalam konteks tersebut, individu harus mempunyai modal sosial untuk dapat diterima secara sosial dan membangun interaksi di ruang sosialnya dengan orang lain (Ritzer, 2012). Menurutnya juga posisi seorang agen dalam ranah politik ditentukan oleh jumlah dan bobot relatif dari modal yang mereka miliki, kapital (modallah) yang memungkinkan orang untuk mengendalikan nasibnya sendiri maupun nasib orang lain (Goodman, 2012). Lanjut Bourdieu, definisi modal sangat luas dan mencakup hal-hal material (yang

dapat memiliki nilai simbolik), serta modal budaya (yang didefinisikan sebagai selera bernilai budaya dan pola-pola konsumsi), modal budaya dapat mencakup rentangan luas seperti seni, pendidikan, dan bentuk-bentuk bahasa.

Bagi Bourdieu modal berperan sebagai relasi sosial yang terdapat dalam suatu sistem pertukaran. Istilah tersebut diperluas pada segala bentuk barang, baik materi maupun simbol, tanpa perbedaan yang mempresentasikan dirinya sebagai sesuatu yang jarang dan layak untuk dicari dalam sebuah formasi sosial tertentu (Takwim, 2009). Sedangkan menurut Kimberly L. Casey dalam "*Defining Political Capital: A Reconsideration of Bourdieu's Interconvertibility Theory*", modal politik dikaitkan dengan berbagai interpretasi. Casey mendefinisikan modal politik dengan menggabungkan berbagai definisi modal yang telah ada untuk membentuk definisi empiris yang berbasis modal politik dan proses yang terkait.

Modal menurut Bourdieu terdiri dari modal simbolik (*symbolic capital*), modal sosial (*social capital*), modal budaya (*cultural capital*) maupun modal ekonomi (*economic capital*). Bagi seorang intelektual publik harus mempunyai habitus yang baik. Salah satunya dibangun melalui kebiasaan membaca buku agar mendapatkan

modal budaya yang baik berupa pengetahuan yang mampu menunjang diskusi. Melalui habitus buku dan modal budaya, seorang intelektual publik akan mampu bersaing dan bertahan di ranah akademik. Ranah dapat dikatakan sejenis pasar kompetitif yang di dalamnya terdapat berbagai jenis modal (ekonomi, kultural, sosial, simbolis) yang digunakan dan dimanfaatkan (Ritzer, 2012).

Menurut Casey, konseptualisasi modal Bourdieu di atas dapat diaktualisasikan dan diperluas ke dalam bentuk kekuasaan. Casey mendefinisikan modal politik sebagai jumlah dari kombinasi jenis lain modal untuk tindakan politik atau pengembalian investasi modal politik yang dikembalikan ke dalam sistem produksi (reinvestasi). Pembentukan modal politik adalah mirip dengan yang di semua proses modal lainnya. Sumber daya Modal yang dikumpulkan melalui tenaga kerja (atau produksi) oleh aktor ke dalam produk. Produksi Istilah di sini dapat diidentifikasi sebagai proses agregasi aktif. Dengan asumsi aktor secara aktif mengejar hasil politik, setelah berbagai sumber daya modal dari berbagai pasar dikumpulkan oleh seorang aktor, mereka menjadi sumber daya politik dan berhenti mempertahankan bentuk mereka masing-masing untuk aplikasi

berbasis berakhir untuk pasar lainnya.

Casey mengidentifikasi tujuh jenis modal utama sebagai elemen-elemen terutama untuk penciptaan modal politik (Casey, 2008):

1. Modal Kelembagaan
2. Modal Manusia
3. Modal Sosial
4. Modal Ekonomi
5. Modal Budaya
6. Modal Simbolik
7. Modal Moral

Sedangkan menurut Firmanzah, ada dua jenis modal politik (Firmanzah, 2010) :

1. Modal Kapital (Modal Uang)

Dalam politik, modal uang berguna untuk membiayai kampanye. Melalui modal uang merupakan salah satu elemen modal politik yang sangat penting bagi partai/ politisi untuk berusaha meyakinkan publik bahwa partai/politisi tersebut adalah partai/politisi yang lebih peduli, empati, memahami benar persoalan bangsa dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Saluran kampanye yang digunakan adalah melalui media promosi, seperti TV, lobi ke ormas, koran, radio, baliho, spanduk, sewa konsultan politik dan pengumpulan massa. Semua sarana kampanye tersebut membutuhkan dana yang besar.

2. Modal Sosial

Berbeda dengan modal *capital* (uang), dalam modal sosial baik politisi dan partai politik lebih mengedepankan akumulasi dari kredibilitas, popularitas dan jaringan yang terdapat di masyarakat. Membangun interaksi yang dinamis dengan masyarakat merupakan modal sosial bagi politisi dan partai politik. Akumulasi modal sosial ini dapat dilakukan baik sebelum dan selama individu terjun dalam dunia politik. Karena legitimasi politik dimiliki ketika seseorang mendapatkan dukungan massif dari masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Popularitas menjadi kata kunci dalam modal sosial untuk mendapatkan pengakuan (*recognition*), perhatian dan ketenaran dalam masyarakat.

Kacung Maridjan pun tidak ketinggalan membahas konsepsi mengenai modal politik kandidat dalam pemilu. Ia memetaforakan kandidat yang bertarung dalam pemilukada ibarat kendaraan, dimana harus adanya mobil yang baik, sopir yang piawai dan bensin yang memadai. Dalam metafora tersebut terwujud dalam tiga bentuk modal, yaitu:

1. Modal Politik

Modal politik berarti adanya dukungan politik, baik dari rakyat

maupun kekuatan politik yang dipandang sebagai representasi dari rakyat. Modal ini menjadi sentral bagi semua orang yang ingin mengikuti kontestasi dalam pilkada secara langsung, baik dalam tahap pencalonan, maupun pada tahap pemilihan.

2. Modal Sosial

Yang dimaksud dengan modal sosial disini adalah bangunan relasi dan kepercayaan yang dimiliki pasangan calon dengan masyarakat pemilihnya. Termasuk didalamnya seberapa jauh pasangan calon itu mampu meyakinkan pemilih bahwa mereka mempunyai kompetensi untuk memimpin daerahnya. Agar bisa dipilih, seorang calon harus dikenal oleh masyarakat. Suatu kepercayaan tidak akan tumbuh begitu saja tanpa adanya pengenalan. Tetapi keterkenalan atau popularitas tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya kepercayaan.

3. Modal Ekonomi

Pemilu, termasuk pilkada, jelas membutuhkan biaya yang besar. Biaya yang besar itu tidak hanya dipakai untuk membiayai kampanye, yang tidak kalah pentingnya adalah untuk membiayai membangun relasi dengan para calon pendukungnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memfokuskan pada objek atau fenomena yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu

kekuatan partai politik islam PPP. Penelitian ini berupaya menyajikan data dan analisis yang rinci terkait obyek dalam penelitian yang dilakukan dengan cukup mendalam dan menyeluruh. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep atau fenomena, masalah sosial, dan lain-lain. Salah satu alasan mengapa menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman peneliti, dimana metode ini dapat menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan suatu yang sulit untuk dipahami. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memfokuskan pada objek atau fenomena yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu Kekuatan Partai Politik Islam Dalam Pemilu Legislatif 2024 Provinsi Jawa Barat (Studi Kasus Partai Persatuan Pembangunan). Dalam penelitian ini, penelitian kualitatif digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena atau objek yang diamati secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam lanskap politik elektoral Indonesia, keberhasilan partai politik tidak hanya ditentukan oleh platform ideologis atau strategi komunikasi massa, melainkan juga oleh akumulasi dan mobilisasi berbagai jenis modal yang menopang

daya saing politik di tingkat akar rumput. Penelitian ini menganalisis dinamika Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Provinsi Jawa Barat, dengan menggunakan kerangka tujuh modal sosial-politik yang mencakup: modal kelembagaan, modal manusia, modal sosial, modal ekonomi, modal budaya, modal simbolik, dan modal moral. Data diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan sejumlah kader, pengurus, dan simpatisan PPP yang terlibat aktif dalam proses politik di tingkat lokal.

1. Modal Kelembagaan

Modal kelembagaan menjadi fondasi utama dalam eksistensi dan operasionalisasi PPP. Dalam praktiknya, PPP memaksimalkan struktur partai dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, hingga RT, yang berfungsi tidak hanya sebagai saluran administratif, tetapi juga sebagai instrumen mobilisasi elektoral. Jejaring ini memungkinkan diseminasi program, pengumpulan aspirasi, serta pelaksanaan kampanye secara simultan dan terkonsolidasi.

Rekrutmen kader dan calon legislatif dilakukan secara berjenjang, dimulai dari kader internal. Jika masih terdapat kekurangan, barulah PPP membuka pintu bagi eksternal yang dianggap memiliki potensi elektoral. Mekanisme ini mencerminkan tata kelola partai yang berbasis kaderisasi internal serta loyalitas struktural. Di samping itu, kehadiran sayap organisasi seperti Wanita Persatuan Pembangunan (WPP), Angkatan Muda Ka'bah (AMK), Generasi Muda Pembangunan

Indonesia (GMPI), dan GPK menjadi bagian integral dari sistem kelembagaan yang diarahkan untuk menjangkau kelompok-kelompok strategis seperti perempuan, pemuda, dan mahasiswa.

Keberadaan kegiatan rutin seperti reses, silaturahmi kader, dan pertemuan PAC menjadi bentuk manifestasi institusionalisasi komunikasi politik secara terstruktur. Proses ini tidak hanya memelihara loyalitas pemilih, tetapi juga menjaga ritme politik partai antara masa pemilu dan non-pemilu.

2. Modal Manusia

Dimensi modal manusia dalam konteks PPP di Jawa Barat tercermin dalam berbagai aspek. Pertama, partai ini menjalin kemitraan dengan lembaga akademik seperti UIN dan kampus Muhammadiyah, serta menginisiasi diskusi-diskusi politik bersama mahasiswa. Hal ini mencerminkan orientasi PPP terhadap peningkatan kapasitas intelektual dan argumentatif dalam diskursus publik.

Kedua, pelatihan berjenjang seperti TOT (*Training of Trainers*) diperuntukkan bagi kader perempuan dari 27 kota/kabupaten, yang kemudian bertugas menyampaikan pendidikan politik di daerahnya masing-masing. Ini menunjukkan

bentuk transfer pengetahuan secara sistematis dan berorientasi pada pemberdayaan.

Ketiga, keterampilan media digital juga menjadi perhatian utama. Sejumlah kader aktif menggunakan media sosial seperti TikTok, yang dianggap lebih efektif dibandingkan Facebook dan Instagram. Adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi ini memperlihatkan kemampuan kader untuk membangun personal branding dan menjangkau pemilih milenial yang notabene merupakan 56,7% populasi pemilih di Jawa Barat.

3. Modal Sosial

PPP menunjukkan keunggulan dalam membangun dan memelihara jaringan sosial, terutama dengan pesantren, tokoh agama, dan komunitas lokal. Koneksi ini tidak hanya bersifat ideologis, tetapi juga praktis, di mana pesantren menjadi episentrum mobilisasi dukungan. Di Tasikmalaya dan Garut, misalnya, basis pesantren menghasilkan suara signifikan bagi PPP, berbeda dengan Bandung yang lebih urban dan minim suara.

Metode silaturahmi ke rumah-rumah, keterlibatan dalam pengajian, dan pertemuan informal lainnya menunjukkan bentuk relasi sosial yang tidak mengandalkan struktur formal semata, tetapi pada kedekatan emosional dan kepercayaan. Khususnya bagi kader perempuan, silaturahmi menjadi instrumen utama dalam membangun kedekatan dengan

konstituen, mengingat masih kuatnya norma sosial patriarki yang menghalangi perempuan tampil di ruang publik secara setara.

Modal sosial ini juga diperkuat oleh kegiatan komunitas seperti pengajian rutin, majelis taklim, serta program Jumat Berkah yang berfungsi sebagai jembatan antara aktivitas keagamaan dan politik. Simpul-simpul sosial ini menciptakan kohesi sosial yang menjadi kekuatan dalam kontestasi elektoral.

4. Modal Ekonomi

Berbeda dengan partai-partai besar yang memiliki akses luas terhadap sumber daya finansial, jaringan donor elite, dan infrastruktur ekonomi partai yang mapan, PPP di Jawa Barat menjalankan strategi yang lebih bersifat kolektif dan berbasis solidaritas internal. Pola pembiayaan yang digunakan lebih menekankan pada gotong royong dan partisipasi aktif dari kader serta pengurus. Dana kampanye dan pembiayaan berbagai kegiatan sosial-politik sebagian besar dihimpun melalui iuran sukarela kader, patungan antar pengurus, serta kerja sama strategis dengan sejumlah pengusaha lokal yang memiliki kedekatan ideologis dan kultural dengan partai.

Kegiatan-kegiatan seperti pasar murah, pembagian sembako, hingga penyelenggaraan bazar rakyat menjadi bentuk konkret implementasi dari strategi ekonomi berbasis keterbatasan. Meski dilaksanakan dengan dana yang minim, program-program ini secara langsung menyentuh persoalan krusial yang dirasakan oleh mayoritas pemilih, yaitu persoalan ekonomi rumah tangga dan ketahanan pangan. Dengan demikian, PPP tetap berupaya hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dengan pendekatan ekonomi yang relevan, meskipun tidak spektakuler secara materiil.

Ketiadaan aset ekonomi partai di tingkat daerah, seperti gedung permanen, unit usaha, atau badan usaha milik partai, menandakan adanya keterbatasan struktural dalam membangun modal ekonomi institusional. Hal ini secara tidak langsung memengaruhi stabilitas keuangan partai dalam jangka panjang serta daya dukung terhadap logistik politik menjelang pemilu. Namun demikian, untuk mengatasi defisit tersebut, PPP memaksimalkan penggunaan modal sosial dan budaya yang telah mengakar kuat di tengah masyarakat. Dukungan pesantren, komunitas keagamaan, dan jaringan kader yang loyal menjadi penopang utama keberlangsungan aktivitas politik, bahkan dalam kondisi keuangan yang terbatas.

Meski begitu, realitas praktik politik uang seperti “serangan fajar”

yang cenderung meningkat tajam menjelang hari pemungutan suara menjadi tantangan berat yang harus dihadapi. Dalam iklim politik yang sangat kompetitif, kekurangan dalam aspek finansial tidak hanya menjadi kendala teknis, tetapi juga menimbulkan dilema moral sekaligus hambatan kompetitif. PPP sebagai partai yang tidak memiliki “amunisi” logistik besar sering kali dirugikan oleh situasi ini, karena kalah bersaing secara materi dengan partai-partai yang mengandalkan pendekatan transaksional.

Dengan kondisi tersebut, PPP dihadapkan pada kenyataan bahwa perjuangan elektoral tidak lagi semata soal visi dan program, tetapi juga menyangkut kapasitas finansial untuk mengimbangi taktik-taktik pragmatis lawan. Maka, ke depan, upaya penguatan modal ekonomi yang berkelanjutan menjadi aspek krusial jika PPP ingin memperluas daya jelajah politiknya tanpa harus kehilangan integritas yang telah lama menjadi identitas moral partai.

5. Modal Budaya

PPP mengakar kuat pada nilai-nilai budaya religius yang telah lama hidup dan mengakar di tengah masyarakat Jawa Barat, terutama di lingkungan komunitas pesantren. Pesantren bukan hanya

menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga memainkan peran penting sebagai ruang pembentukan nilai-nilai sosial, moral, dan bahkan politik. Kegiatan seperti khalaqah, pengajian, dan pendampingan tokoh-tokoh pesantren menjadi manifestasi konkret dari kekuatan modal budaya yang dijalankan secara konsisten oleh PPP. Melalui jejaring ini, PPP mampu menjalin relasi kultural yang tidak hanya simbolis, tetapi juga strategis dalam membangun kepercayaan masyarakat.

Dalam konteks ini, munculnya perempuan-perempuan dari lingkungan pesantren yang aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan menjadi indikasi bahwa representasi politik tidak selalu harus bersandar pada narasi modernitas, melainkan dapat tumbuh dari nilai-nilai lokal yang sudah lama eksis dan mendapat tempat di hati masyarakat. Keterlibatan mereka mencerminkan bahwa ruang politik dapat diisi oleh figur-figur yang memperoleh legitimasi dari otoritas moral dan religius. Kiprah mereka tidak hanya memperluas spektrum kepemimpinan politik berbasis nilai-nilai Islam kultural, tetapi juga menunjukkan bahwa nilai keagamaan dan peran strategis perempuan dapat berjalan beriringan secara konstruktif dalam arena politik formal.

Meskipun demikian, budaya patriarki yang masih mengakar kuat di banyak wilayah Jawa Barat tetap menjadi tantangan utama dalam mendorong partisipasi politik

perempuan. Hambatan struktural ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kultural—di mana perempuan seringkali diposisikan sebagai pendukung, bukan pemimpin. Dalam menjawab tantangan tersebut, PPP memilih pendekatan yang bersifat personal dan emosional, terutama melalui praktik silaturahmi intensif, kegiatan sosial keagamaan, dan pemberdayaan peran perempuan di ranah domestik dan komunitas.

Alih-alih menggunakan narasi emansipasi yang cenderung normatif dan berbasis wacana modern, PPP menyesuaikan pendekatannya dengan realitas sosiokultural lokal. Strategi ini dinilai lebih efektif, karena menyentuh sisi psikologis dan spiritual masyarakat, khususnya perempuan, yang merasa lebih terhubung dengan nilai-nilai tradisional dan agama.

Dengan mengadopsi pendekatan berbasis kearifan lokal tersebut, PPP mampu menciptakan ruang partisipasi politik perempuan tanpa harus berbenturan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Modal budaya dalam hal ini tidak hanya menjadi alat pengikat identitas kolektif, tetapi juga instrumen strategis dalam merawat keberlanjutan basis dukungan elektoral yang berakar pada nilai

religius dan tradisional masyarakat Jawa Barat.

6. Modal Simbolik

PPP mengedepankan tokoh-tokoh berpengaruh sebagai simbol representatif partai untuk memperkuat identitas politik dan memperluas daya tarik elektoral di tengah masyarakat. Figur nasional seperti Sandiaga Uno dan almarhum Mbah Maimoen tidak hanya dihadirkan sebagai panutan religius dan moral, tetapi juga sebagai ikon politik yang mencitrakan PPP sebagai partai yang religius sekaligus moderat dan terbuka. Di samping itu, sejumlah tokoh lokal dari kalangan pesantren di Jawa Barat juga dijadikan simbol representatif yang dekat dengan akar budaya dan nilai-nilai masyarakat setempat.

Strategi ini dimaksudkan untuk membangun kedekatan emosional dengan konstituen, terutama pemilih tradisional yang masih menjadikan figur ulama dan tokoh masyarakat sebagai referensi utama dalam menentukan pilihan politik. Namun, wawancara dengan kader dan pengurus partai juga menunjukkan bahwa kekuatan simbolik ini memiliki keterbatasan ketika berhadapan dengan realitas politik yang semakin pragmatis. Tanpa didukung oleh strategi kampanye yang kuat—termasuk dalam hal logistik dan insentif elektoral—daya pengaruh simbolik cenderung kalah bersaing dengan pendekatan transaksional yang digunakan oleh partai-partai lain.

Di tingkat representasi perempuan, PPP masih menghadapi tantangan besar. Belum banyak tokoh perempuan nasional dari internal partai yang memiliki daya tarik simbolik kuat dan dikenal luas oleh publik. Hal ini menciptakan kekosongan representasi simbolik yang dapat menghambat perluasan dukungan dari pemilih perempuan secara lebih luas dan strategis.

Kendati demikian, di tingkat lokal, sejumlah perempuan dari kalangan pesantren mulai menempati ruang-ruang simbolik ini, terutama mereka yang aktif dalam kegiatan sosial-keagamaan dan pemberdayaan masyarakat. Mereka menjadi cerminan potensi kepemimpinan perempuan yang berbasis nilai-nilai religius dan budaya lokal. Meski demikian, jalan mereka tidak mudah. Untuk dapat diterima secara luas sebagai representasi politik, mereka harus menghadapi dan menembus stigma sosial yang masih mengakar, yakni pandangan konservatif bahwa “perempuan tidak bisa mewakili perempuan”. Kondisi ini menuntut upaya yang lebih besar, baik dari sisi kapasitas personal maupun dukungan struktural dari partai, agar simbolik politik perempuan dapat benar-benar menjadi kekuatan elektoral yang nyata.

7. Modal Moral

Modal moral menjadi elemen reflektif yang paling menggambarkan ketegangan antara idealisme dan realitas politik di lapangan. Dalam wawancara yang dilakukan, muncul pengakuan jujur dari para kader dan pengurus bahwa dinamika politik elektoral di level akar rumput sangat sarat dengan praktik transaksional. Meskipun secara normatif mereka menolak keras fenomena “serangan fajar” dan bentuk politik uang lainnya, kenyataan menunjukkan bahwa praktik semacam itu masih menjadi strategi dominan di berbagai daerah, terutama menjelang hari pemungutan suara.

Kondisi ini menimbulkan dilema moral tersendiri bagi PPP yang secara historis mengusung nilai-nilai keislaman dan etika publik dalam setiap proses politiknya. Di satu sisi, mereka ingin mempertahankan integritas partai dan visi dakwah politik yang bersih; namun di sisi lain, kompetisi yang keras seringkali memaksa mereka menghadapi kenyataan bahwa suara pemilih kerap kali “diperebutkan” bukan dengan gagasan, melainkan dengan materi.

Meskipun demikian, PPP tetap berkomitmen untuk menghadirkan pendidikan politik yang etis dan memberdayakan, terutama melalui kader-kader perempuannya. Peran mereka menjadi penting dalam menyampaikan pesan moral dan nilai-nilai keadilan sosial, khususnya dalam memperjuangkan isu-isu dasar seperti

hak maternitas, ruang menyusui, layanan kesehatan, dan perlindungan perempuan. Di tengah arus pragmatisme politik yang kian menguat, upaya ini menjadi wujud keberanian untuk mempertahankan idealisme dalam ruang-ruang yang kerap digempur oleh kepentingan jangka pendek

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait Kekuatan Partai Politik Islam pada Pemilu 2024, PPP merupakan salah satu partai politik islam yang mampu mempertahankan eksistensinya ditengah kemunculan partai politik islam yang baru. Kekuatan utama dari Partai Persatuan Pembangunan ini terletak pada modal sosial, PPP menunjukkan

keunggulan dalam membangun dan memelihara jaringan sosial, terutama dengan pesantren, tokoh agama, dan komunitas lokal. Koneksi ini tidak hanya bersifat ideologis, tetapi juga praktis, di mana pesantren menjadi episentrum mobilisasi dukungan. Di Tasikmalaya dan Garut, misalnya, basis pesantren menghasilkan suara signifikan bagi PPP, berbeda dengan Bandung yang lebih urban dan minim suara. Modal kelembagaan menjadi fondasi utama dalam eksistensi dan operasionalisasi PPP. Dalam praktiknya, PPP memaksimalkan struktur partai dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, hingga RT, yang berfungsi tidak hanya sebagai saluran administratif, tetapi juga sebagai instrumen mobilisasi elektoral.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). Jumlah penduduk Jawa Barat 2023. <https://www.bps.go.id>
- Casey, K. L. (2008). Defining Political Capital: A Reconsideration of Bordieu's Interconvertibility Theory.
- Firmanzah. (2010). *Persaingan Legitimasi Kekuasaan dan Marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Jung, E. (2014). *Islamic organization and electoral politics in Indonesia: The case of Muhammadiyah*. SAGE Publications.
- Goodman, R. a. (2012). *Teori Sosiologi Modern edisi keenam*. Jakarta: Kencana Media.
- Komisi Pemilihan Umum. (2023). Profil pemilih Jawa Barat 2023. <https://www.kpu.go.id>
- Litbang Kompas. (2023). Survei prioritas isu pemilih Jawa Barat 2023. <https://www.kompas.id>
- Maridjan, K. (2007). *Pilkada Langsung : Resiko Politik, Biaya Ekonomi, Akuntabilitas Politik dan Demokrasi Lokal*. Disampaikan

- pada “In-House
Discussion Dialog
Komunikasi Partai
Politik” yang
diselenggarakan oleh
Komunitas Indonesia
untuk Demokrasi (KID).
Jakarta. Hlm. 7.
- Maridjan, K. (2012). Politik uang
dan modal sosial dalam
pemilu lokal. Pustaka
Pelajar
- Miles, M. B., & Huberman, A. M.
(1992). *Qualitative data
analysis: An expanded
sourcebook* (Edisi ke-2).
Sage Publications.
- Ritzer. (2012). *Teori Sosiologi Klasik :
Post Modern* . Yogyakarta:
Kreasi Wacana.
- Takwim, B. (2009). *Habitus x Modal +
Ranah = Praktik (Pengantar
Paling Komprehensif kepada
Pemikiran Pierre Bourdieu)*.
Yogyakarta: Jalasutra.
*Paper Presented at the Illinois
State University Conference for
Student od Political Science* (p.
11). St. Louis: University of
Missouri.